

## SINOPSIS

Orde Baru berkuasa ditopang oleh tiga pilar kekuatan politik. Tiga pilar kekuatan politik itu diantaranya adalah ABRI, Golkar, dan teknokrat sipil. Berselingkuhan ABRI, Golkar, dan teknokrat ini melahirkan rezim otoritarian yang bercorak militeristik. Dalam rezim (negara) yang otoriter, militer merupakan aktor politik yang dominan. Militer menguasai hampir seluruh proses penyelenggaraan negara, mulai dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan sektor strategis lainnya. Hegemoni militer semasa Orde baru menyebabkan tumpulnya kekuatan *civil society* dan tidak berkembang sebagaimana yang terjadi di negara yang menganut paham demokrasi. Semasa Orde baru potensi kekuatan *civil society* selalu ditumpas oleh negara melalui kekuatan militer. Ruang-ruang demokrasi ditutup rapat-rapat dengan alasan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Setiap individu, kelompok maupun organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah harus siap-siap ditumpas dan direpresi militer dengan moncong senjata. Rakyat hanya dimobilisir, tidak dididik dan sengaja diambangkan melalui politik *rotating mass*.

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif eksploratif, yakni penelitian yang mendapatkan data awal atau hal-hal baru yang belum jelas. Sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji. Data yang didapat di analisa untuk mendapatkan suatu pembacaan yang komprehensif mengenai relasi demiliterisasi dan penguatan *civil society* di Indonesia setelah tumbang rezim otoriter.

Sejak kejatuhan rezim otoriter-militeristik pada Mei 1998, Indonesia mulai mendemokratisasikan sistem politiknya. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah demiliterisasi, yakni penarikan militer dari ranah politik. Demiliterisasi di Indonesia mengalami pasang surut. Demiliterisasi diawali pada era Habibie, dan mencapai puncaknya pada pemerintahan Gus Dur. Demiliterisasi ini mulai berjalan mundur sejak Megawati menggantikan posisi Gus Dur. Megawati justru banyak mengakomodir kepentingan militer dibanding kepentingan rakyatnya (sipil). Hal ini dapat kita lihat dari tidak seriusnya pemerintahan Megawati dalam penyelesaian kasus HAM berat yang melibatkan militer. Demokratisasi membawa dampak yang positif bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Indikatornya dapat dilihat dari menjamurnya partai politik (41), meningkatnya jumlah NGO (70.000 pada tahun 2000), rakyat semakin berani melakukan aksi-aksi politik menuntut hak-haknya baik melalui saluran politik resmi maupun dengan demonstrasi. Kebebasan pers-pun mulai dirasakan, jumlah media cetak yang memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers mencapai 350-an. Untuk meminimalisir sentralisasi kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan distribusi pembangunan, pemerintah pusat kemudian mengundangkan UU Otonomi No. 22 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai wujud komitmennya.

Pembahasan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada relasi yang positif dan cukup kuat antara demiliterisasi dengan menguatnya *civil society* di Indonesia sejak kejatuhan Orde Baru. Agar *civil society* berkembang, hal-hal yang harus dilakukan adalah: rakyat dididik *melek* politik; militer di profesionalkan; menciptakan kelas menengah yang otonom dan mandiri; membuka ruang bagi pers; kemudahan akses